

# GERAKAN KEMANDIRIAN PANGAN MELALUI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN : ANALISIS KINERJA DAN KENDALA

## *Food Self-Reliance Movement Through The Village Food Resilience Program: Analyses and Constraints*

**Valeriana Darwis**

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

Naskah masuk : 30 Januari 2012

Naskah diterima : 9 Mei 2012

### **ABSTRACT**

The village food resilience program has been implemented since 2006. The program was designed for 4 years per period aimed at reducing food insecurity in rural areas. There are already 158 villages expected get into the stage of self reliance and these villages are expected to develop three other villages in the Food Self Reliance Movement Program. However, implementation of this program is not successful to develop the surrounding villages to become the core villages because of inactive institution of food self reliance villages. This institution will become the resource organization and an internship for villages that will be developed. These institutions consist of Affinity Group (Kelompok Afinitas/KA), Village Financial Institutions (Lembaga Keuangan Desa /LKD), and Food Camp Team (Tim Pangan Desa/TPD). In this case, institutional empowerment program is required. In addition, the government budget is also required to operate TPD and LKD. The budget is first initiated by the Food Security Agency Ministry of Agriculture Indonesia included in the financial activities for Food Self Reliance Movement. The funds for the next years are expected from the regional budgets particularly those of provincial and regency governments or called as APBD I and APBD II. Furthermore, role of Food Security Services in the provinces needs improvement to enable each regency to conduct monitoring and evaluation activities. Similarly, frequent replacement of officials at each regency level can be avoided.

**Key words** : *empowerment, village food resilience, and self reliance movement*

### **ABSTRAK**

Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) dilaksanakan tahun 2006 dan sampai sekarang masih berlanjut. Program dirancang dalam kurun waktu 4 tahun (tahap) dengan tujuan akhir mengurangi rawan pangan di perdesaan (mandiri). Sudah 158 desa masuk tahap kemandirian dan diharapkan desa yang sudah mandiri bisa membina 3 desa lainnya dalam program Gerakan Kemandirian Pangan. Tetapi dalam pelaksanaannya program ini

tidak berhasil menjadikan seluruh desa mandiri menjadi desa inti, hal ini disebabkan kelembagaan Demapannya tidak aktif. Sementara kelembagaan tersebut akan menjadi narasumber dan tempat magang desa yang akan dibina (replikasi). Kelembagaan tersebut adalah Kelompok Afinitas (KA), Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Tim Pangan Desa (TPD). Bagi desa yang sudah tidak aktif kelembagaannya, maka program tidak perlu dilanjutkan. Sebaliknya bagi desa yang kelembagaannya kurang aktif, maka diperlukan kegiatan pemberdayaan kelembagaan. Selain itu diperlukan dana dari pemerintah untuk pengurus dalam menggerakkan lembaga TPD dan LKD. Dana itu diinisiasi dahulu dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dimasukkan dalam dana kegiatan Gerakan Kemandirian Pangan. Tahun berikutnya dana tersebut diharapkan dari dana APBD Tk I dan APBD Tk II. Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan Demapan maka peranan BKP Provinsi perlu ditingkatkan lagi agar masalah kabupaten tidak melakukan monev kegiatan dengan baik dan seringnya pergantian SDM di tingkat kabupaten bisa diatasi.

**Kata kunci :** *pemberdayaan, Desa Mandiri Pangan dan Gerakan Kemandirian Pangan*

## PENDAHULUAN

Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) merupakan program aksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal perdesaan. Untuk tercapainya tujuan Demapan program dirancang dalam kurun waktu 4 tahun, melalui 4 tahapan yaitu : (i) *tahap persiapan*, meliputi seleksi desa rawan pangan dan pembentukan kelompok KK miskin ; (ii) *tahap penumbuhan*, mulai adanya usaha produktif, pembentukan Lembaga Keuangan Desa (LKD), berfungsinya posyandu dan bekerjanya sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan sarana prasarana wilayah perdesaan, (iii) *tahap pengembangan*, adanya perkembangan ekonomi produktif, peningkatan modal LKD, pengembangan sistem ketahanan pangan ; (iv) *tahap kemandirian*, adanya peningkatan dinamika kelompok dan usaha ekonomi produktif, adanya jaringan kemitraan, berfungsinya LKD sebagai layanan modal dan berfungsinya Tim Pangan Desa (TPD) dalam mengkoordinasikan program lintas sektoral.

Desa yang sudah mandiri berarti desa yang tidak mengalami masalah ketahanan pangan karena masyarakatnya sudah mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Adapun indikator untuk melihat desa mandiri tersebut antara lain : (1) peningkatan peran kelembagaan yang telah ditumbuhkan terhadap terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan, (2) dukungan program daerah terhadap aspek pemberdayaan masyarakat, (3) dukungan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang pembangunan tingkat desa, (4) adanya komitmen dan peran pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program Demapan.

Desa mandiri ini selanjutnya akan dikembangkan menjadi desa inti dalam Gerakan Kemandirian Pangan. Gerakan Kemandirian Pangan merupakan kegiatan dimana desa inti akan menjadi desa contoh dalam menggerakkan dan membina desa sekitarnya. Dalam Gerakan Kemandirian Pangan, peran aparat pemerintah daerah lebih dominan, sebaliknya peran pemerintah pusat semakin kecil. Selain itu untuk menjadi desa inti peranan kelembagaan Demapan menjadi penting, karena lembaga inilah nantinya yang akan membimbing desa lainnya sebagai desa binaan. Adapun kelembagaan itu antara lain adalah : Kelompok Afinitas (KA), Tim Pangan Desa (TPD) dan Lembaga Keuangan Desa (LKD).

TPD berfungsi sebagai koordinator pembangunan ketahanan pangan tingkat desa. TPD diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat/tokoh adat dan aparat desa setempat dalam menyusun rencana pembangunan wilayah desa (RPWD) secara partisipatif untuk mewujudkan ketahanan pangan desa. Kegiatan TPD diantaranya adalah menyusun usulan terhadap pemenuhan ketersediaan pangan masyarakat desa melalui produksi sendiri dengan mengoptimalkan lahan, mengarahkan masyarakat untuk mengembangkan percepatan diversifikasi pangan, pemanfaatan pekarangan, dan perbaikan gizi.

Dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua desa yang sudah masuk tahap kemandirian dapat menjadi desa inti. Hal ini berdasarkan dari kelembagaan yang ada di program Demapan tidak bekerja secara optimal, hal ini terlihat dari hasil evaluasi program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2009 yang merekomendasikan antara lain : (i) dalam pelaksanaan kegiatan Demapan dibutuhkan integrasi program lintas sektor, untuk itu perlu diaktifkan peran koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. (ii) mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas untuk tenaga pendamping, TPD, LKD, dan KA (BKP, 2009). Pelatihan-pelatihan yang diperlukan antara lain dibidang keorganisasian/kelembagaan, finansial, pemasaran hasil, dan kewirausahaan (Rusastra *et al.*, 2008). Lebih lanjut Rachman *et al.* (2010) berpendapat dalam menyukseskan program Demapan dibutuhkan dukungan lintas sektoral terkait dengan pembinaan dan pendanaan yang mencakup pengembangan kelembagaan, aktivitas pemberdayaan, dukungan sarana-prasarana dengan sasaran pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini bertujuan menganalisis kinerja dan kendala pelaksanaan program Demapan serta memberi usulan agar pemerintah tidak lagi meneruskan program Demapan ke program Gerakan Kemandirian Pangan bagi desa yang kelembagaan inti Demapan sudah tidak berfungsi lagi. Sebaliknya desa yang kurang aktif kelembagaan intinya, pemerintah bisa meneruskan dengan cara memberdayakan kembali lembaga tersebut sehingga bisa menjadi desa inti atau desa yang bisa melakukan/menjadi desa replikasi mandiri pangan dalam gerakan kemandirian pangan.

## EVALUASI DESA MANDIRI PANGAN

### Evaluasi dari Badan Ketahanan Pangan

Program Desa Mandiri Pangan mulai dilaksanakan sejak tahun 2006 dan hingga tahun 2012 program ini masih dilaksanakan. Program ini direncanakan dilaksanakan di 1.000 desa kemudian meningkat pada tahun 2007 menjadi 1.416 desa (Tabel 1). Tetapi untuk tahun berikutnya turun menjadi 884 desa (2008), turun lagi ditahun 2009 menjadi 349 desa dan naik pada tahun 2010 menjadi 470 desa, sebaliknya di tahun 2011 turun lagi menjadi 262 desa. Penurunan ini juga terjadi pada realisasinya, yaitu dari total 4.381 desa yang terealisasi sebanyak 2.851 desa. Beberapa penyebab tidak sesuainya realisasi dan rencana antara lain adalah : masalah keterbatasan anggaran dan ketidaksiapan desa menjalankan program Demapan.

Desa yang sudah masuk tahap kemandirian atau yang mendapatkan program pada tahun 2006 sebanyak 158 desa atau 668 kelompok. Sebagian besar usaha yang dijalankan oleh KA tersebut paling banyak bergerak di bidang on farm (62%), kemudian off farm (20%) dan non farm (18%). Sementara itu kalau dilihat dari perkembangan modal LKD, telah terjadi peningkatan sebesar 30,45 persen atau dari modal awal sebesar Rp. 16,49 M menjadi Rp. 19,71 M.

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Jumlah Desa mandiri Pangan di Indonesia, 2006-2011

Tahun	Rencana			Realisasi		
	Provinsi	Kab/kota	Desa/ kelurahan	Provinsi	Kab/kota	Desa/ kelurahan
2006	30	122	1.000	30	122	985
2007	32	58	1.416	32	58	561
2008	32	21	884	32	21	221
2009	33	74	349	33	74	359
2010	33	107	470	33	106	466
2011	33	18	262	33	18	262
Total	33	400	4.381	33	399	2.851

Sumber : BKP (2011)

Dana untuk kegiatan Demapan dalam bentuk bantuan sosial dan pada tahun 2006 disediakan sebanyak Rp. 24.040 juta. Dalam setiap tahunnya dana yang disediakan pemerintah pusat mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2008

mengalami penurunan (Tabel 2). Dalam kurun waktu enam tahun rata-rata kenaikan anggaran setiap tahunnya sebesar 18.53 persen.

Program Demapan diperuntukkan bagi keluarga miskin dan pada tahun 2006 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menerima manfaat sebanyak 31.250 KK dan setiap tahunnya RTM ini mengalami peningkatan. Untuk tahun 2011 RTM yang menerima manfaat sebanyak 304.750 KK atau mengalami peningkatan sebanyak 875,2 persen. Rata-rata setahun RTM yang menerima manfaat dari kegiatan ini mengalami peningkatan sebesar 62.05 persen.

Tabel 2. Perkembangan Bansos Demapan dan RTM Penerima Program di Indonesia, 2006-2011

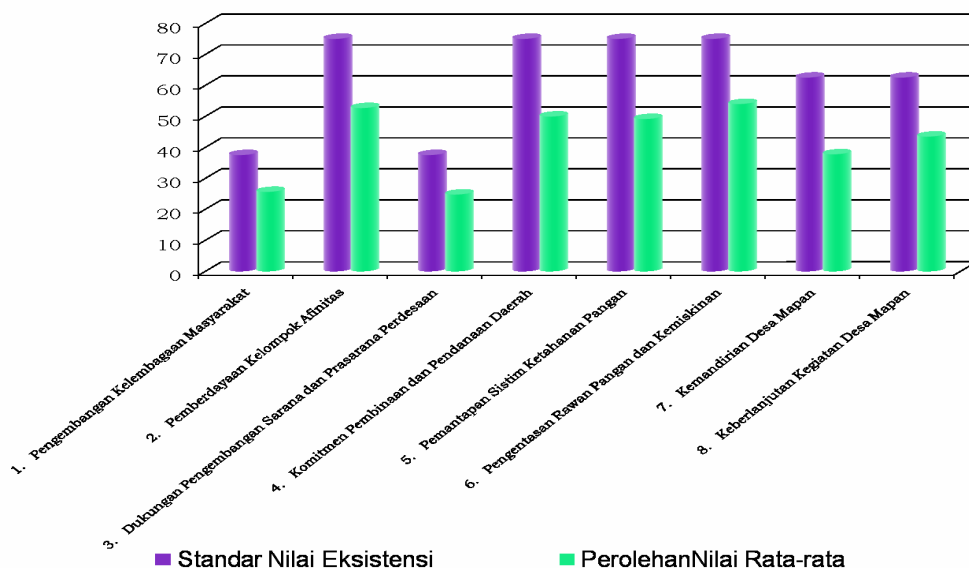
Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Trend
Bansos (juta)	24.040	35.400	22.100	35.900	50.230	40.500	18.53
RTM (kk)	31.250	75.500	103.125	148.000	235.625	304.750	62.05

Sumber : BKP (2011)

RTM adalah rumah tangga sasaran yang ditetapkan melalui survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) dengan 13 indikator kemiskinan: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, konsumsi pangan, konsumsi non pangan, modal (lahan, tabungan, ternak), sarana transportasi, perabotan rumah tangga, luas tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, sumber air minum, sumber penerangan, asupan gizi, porsi pangan antar anggota rumah tangga. Sementara itu yang yang dimaksud dengan DDRT adalah kegiatan pendataan lengkap (Sensus) rumah tangga di suatu wilayah untuk memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya dalam kerangka mengidentifikasi rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sudah mengevaluasi desa yang sudah memasuki tahap kemandirian dan desa itu adalah desa yang menerima program pada tahun 2006. Dari hasil alat analisis yang dipergunakan terlihat desa Demapan tahun 2006 yang masuk kategori klasifikasi kurang sebesar 2 persen; klasifikasi sedang 61 persen; dan klasifikasi baik 37 persen.

Evaluasi yang dilakukan berdasarkan 8 dimensi, yaitu : pengembangan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kelompok afinitas, dukungan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan, komitmen pembinaan dan pendanaan daerah, pengembangan sistem ketahanan pangan, pengentasan rawan pangan dan kemiskinan, kemandirian desa mapan dan keberlanjutan desa mapan. Dari perolehan nilai rata-rata terlihat semua dimensi dibawah nilai eksistensi yang telah ditetapkan (gambar 1). Dimensi kemandirian desa mapan justru yang paling rendah atau berbeda jauh dengan nilai yang telah ditetapkan.



Sumber : BKP (2011)

Gambar 1. Perolehan Nilai Dimensi Program Demapan di Indonesia

## Evaluasi Tim Evaluator

Lembaga yang harus ada pada setiap desa yang sudah memasuki tahap kemandirian adalah : Kelompok Afinitas (KA), Lembaga Keuangan Desa (LKD), Tim Pangan Desa (TPD). Sementara lumbung pangan tidak diharuskan ada, karena tidak dianggarkan khusus dalam program Demapan. Bagi desa yang ada lumbung pangan, kondisi ini merepresentasikan adanya sinergi antara kebijakan pusat dengan daerah dalam mewujudkan kemandirian desa. Pembangunan lumbung pangan dianggarkan melalui APBD yang dibagi atas pembangunan fisik dan penyediaan modal untuk membeli bahan pangan mengisi lumbung pangan tersebut. Sementara peranan pendamping akan berhenti pada saat desa sudah memasuki tahap kemandirian.

Hasil uji petik yang dilakukan oleh tim evaluator (Rusastra *et al.*, 2011) di empat desa contoh terlihat keragaman keberadaan dan keaktifan dari masing-masing lembaga tersebut (Tabel 3). Pemilihan lokasi uji petik ditentukan secara *purposive* berdasarkan pemilihan provinsi yang ada di Jawa dan Luar Jawa. Di Jawa dipilih provinsi yang mempunyai aksesibilitas tinggi dan di luar Jawa dipilih lokasi dengan aksesibilitas rendah. Kabupaten yang dijadikan kasus adalah kabupaten yang sudah memasuki tahap kemandirian, dan masing-masing kabupaten akan diwakili dua desa yang sudah mandiri. Dengan kriteria tersebut desa yang terpilih adalah Desa Cimahi, Desa Cihanjaro, di Kabupaten Kuningan,

Provinsi Jabar dan Desa Pulau Rumpit, Desa Siberobah di Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau.

Di Desa Cimahi KA masih aktif, bahkan KA berkembang dari awalnya dua kelompok menjadi tiga kelompok. Usaha anggota kelompok terdiri dari usaha pengolahan pangan lokal (kripik singkong, kacang sangrai, tepung jagung, dll), memelihara ternak, serta modal untuk pembelian pupuk dan obatan-obatan (saprodi). Masing-masing KA mempunyai buku kelompok untuk kehadiran dalam pertemuan dan buku pinjaman anggota. Pertemuan kelompok dan pembinaan kelompok dilakukan satu kali dalam sebulan. Pembinaan kelompok dilakukan oleh TPD dan aparat desa.

TPD sudah terbentuk dan aktif melakukan pertemuan berkala, bahkan pengurus TPD dilibatkan juga dalam merancang pembangunan desa. LKD sudah terbentuk, tetapi belum berfungsi sebagai lembaga yang mengatur keuangan. Keuangan masih dipegang oleh pengurus KA dan KA melaporkan berapa pinjaman, siapa yang meminjam dan untuk apa pinjaman tersebut ke LKD. KA pada prinsipnya mau menyerahkan seluruh dana yang ada ke LKD, asal transparan dan ada aturan yang jelas. Lumbung pangan sudah ada dalam bentuk bangunan khusus dan dimanfaatkan tidak hanya anggota KA saja melainkan seluruh masyarakat desa. Pendamping sudah tidak dilibatkan lagi, tetapi secara pribadi anggota KA dapat menghubungi pendamping untuk memecahkan masalah dalam KA. Pembangunan lintas sektoral juga terlihat di desa ini, yang direpresentasikan dengan dilaksanakannya program LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan) dananya bersumber dari APBD tk II, dimana mempergunakan tenaga pendamping Demapan sebagai salah satu fasilitatornya.

Tabel 3. Fungsi Lembaga Program Demapan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Kuansing, 2006 - 2010

Lokasi	KA	LKD	TPD	Lumbung	Penyuluh
1. Kab. Kuningan					
- Desa Cimahi	V	X	V	V	V
- Desa Cihanjaro	X	V	X	V	X
2. Kab. Kuansing					
- Desa Pulau Rumpit	X	X	X	X	X
- Desa Siberobah	X	V	X	V	X

Sumber : Rusastra *et al.* (2011)

Desa Cihanjaro KA masih ada, tetapi sudah tidak aktif lagi secara kelembagaan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya jadwal pertemuan kelompok, anggota kelompok mulai berkurang dan berkurangnya ragam usaha kelompok. Untuk kondisi sekarang modal kelompok dipergunakan untuk usaha pengadaan saprodi dan penggemukan ternak. TPD secara legal ada, yaitu dalam bentuk pengesahan dari kepala desa. Tetapi dalam pelaksanaannya TPD ini tidak

berfungsi secara optimal, yang terlihat dari : tidak adanya jadwal pertemuan baik secara berkala maupun kontemporer dan tidak selamanya pengurus TPD dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. LKD sudah dibentuk dan bertugas mengelola keuangan kelompok. Bangunan fisik lumbung pangan sudah ada dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Petugas pendamping sama sekali tidak berhubungan dengan anggota kelompok afinitas, tugas lanjutannya dipercayakan kepada penyuluh pendamping tenaga harian lepas.

KA tidak ada di Desa Pulau Rumpit, yang ada adalah kelompok usaha. Awalnya susah membentuk KA yang berbasiskan ragam usaha seperti yang dianjurkan di pedoman umum. Hal ini disebabkan kondisi desa yang umumnya masyarakat mengantungkan sumber pendapatan dari tanaman perkebunan, khususnya karet. Untuk mengatasi masalah ini, maka penerima manfaat program berdasarkan usaha si peminjam, seperti : kelompok jagung, kelompok ternak, dan kondisi sekarang kelompok usaha yang meminjam dana program sudah tidak ada lagi. LKD sudah terbentuk sejak tahun 2007 dan LKD sudah mengelola uang. Peminjam uang melalui mekanisme anggota mengusulkan pinjaman untuk usaha dan setelah mendapatkan persetujuan dari anggota lainnya maka LKD akan memberikan pinjaman. LKD ini hanya bertahan sampai tahun 2008, karena pada saat krisis ekonomi banyak anggota kelompok usaha yang tidak mengembalikan pinjamannya. TPD tidak pernah dibentuk sejak dari awal mendapatkan program. Lumbung pangan baik secara fisik maupun isinya tidak ada, karena masyarakat di Pulau Rumpit sudah terbiasa tidak menjual seluruh hasil panen padi, melainkan disimpan dirumah untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Desa Siberobah kondisinya tidak berbeda jauh dengan Desa Pulau Rumpit, dimana penerima manfaat berdasarkan kelompok usaha. Kondisi sekarang KA atau kelompok usaha tidak ada lagi dan dana yang ada diperuntukkan untuk seluruh warga desa. LKD terbentuk tahun 2007, tetapi karena pengurusnya tidak aktif maka manajemen LKD dipegang oleh Kepala Desa. LKD melaksanakan tugas rutin setiap bulan sekali dengan topik utama membahas masalah pinjaman. TPD pernah ada dan diketuai oleh sekretaris desa, tetapi sekarang TPD tidak berfungsi lagi. Lumbung pangan di desa ini sudah ada dan pembangunan fisik serta dana untuk pembelian gabah disediakan oleh pemerintah daerah. Lumbung pangan paling banyak gabahnya berasal dari luar desa, tetapi pemanfaatannya diprioritaskan untuk masyarakat desa.

Dari empat desa mandiri yang dikunjungi hanya Desa Cimahi saja yang kelembagaannya lebih banyak berfungsi, dua desa lainnya yang berfungsi hanya LKD. Sedangkan Desa Pulau Rumpit tidak ada satupun lembaga yang aktif lagi. Kondisi ini mengartikan bahwa Desa Cihanjaro, Desa Siberobah dan Desa Pulau Rumpit belum bisa dijadikan desa inti. Pada saat survei Desa Cimahi sedang melakukan replikasi kegiatan di tiga desa. Langkah pertama dilakukan untuk membina adalah sosialisasi kegiatan Demapan oleh TPD. Setelah itu TPD bersama aparat desa dan tokoh desa binaan membentuk KA. Kemudian KA tersebut diajak ke KA Desa Cimahi untuk melihat jenis usaha dan bagaimana caranya mengelola



kelembagaan kelompok. Setelah itu diperkenalkan juga ke LKD yang nantinya akan mengurus masalah keuangan KA.

## **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi (monev) oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dilakukan melalui kuesioner yang substansinya direpresentasikan dalam 8 dimensi. Kuesioner terdiri dari evaluasi untuk setiap tahapan dan evaluasi untuk desa yang sudah masuk tahap kemandirian. Selanjutnya BKP pusat mengundang BKP provinsi untuk kegiatan sosialisasi kuesioner, alat analisis dan format outline laporan kegiatan. Diharapkan provinsi juga melakukan hal yang sama sebelum kuesioner, alat analisis dan format outline laporan kegiatan Demapan dikirim ke kabupaten. Laporan monev tingkat kabupaten dipresentasikan di tingkat provinsi dan terakhir laporan monev provinsi dipresentasikan secara nasional dalam workshop Desa Mandiri Pangan yang dilaksanakan oleh BKP pusat.

Workshop tahun 2011 merekomendasikan beberapa hal diantaranya adalah (Rusastra *et al.*, 2011) : (i) BKP pusat dan provinsi agar bersinergi dalam pemantapan sosialisasi dan pelatihan monev di tingkat kabupaten; (ii) pelaksanaan monev kabupaten membutuhkan pendampingan dalam perencanaan, implementasi, analisis data, dan penulisan laporan; (iii) desentralisasi monev kabupaten perlu dipertahankan, karena kabupaten merupakan institusi terdepan dalam pelaksanaan program Demapan; (iv) dukungan pembinaan dan pendanaan terkait dengan pelaksanaan monev di tingkat kabupaten (dan juga di tingkat provinsi) menjadi sangat penting.

## **GERAKAN KEMANDIRIAN PANGAN**

Gerakan Kemandirian Pangan (Gema Pangan), merupakan kelanjutan kegiatan desa mapan untuk memperluas manfaat kegiatan bagi desa-desa sekitarnya. Desa yang sudah mandiri dijadikan desa inti, dan bersama lembaga masyarakat serta pemerintah daerah melakukan pembinaan bagi tiga desa rawan pangan di sekitarnya sebagai desa replikasi selama tiga tahun dalam tiga tahap: penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian.

Gerakan Kemandirian Pangan adalah upaya bersama berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola aset setempat (sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik/teknologi, serta sumber daya sosial) untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat melalui penanganan Desa Rawan Pangan menjadi Desa Mandiri Pangan.

Gema Pangan bertujuan untuk : memobilisasi dan membangun partisipasi seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah untuk memanfaatkan dan mengelola aset secara baik guna meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, sekaligus mengurangi kerawanan pangan dan gizi masyarakat sesuai kelembagaan dan budaya lokal. Aset meliputi sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya sosial.

Gema Pangan sebagai keberlanjutan Kegiatan Desa Mandiri Mapan, dilaksanakan melalui lima subgerakan:

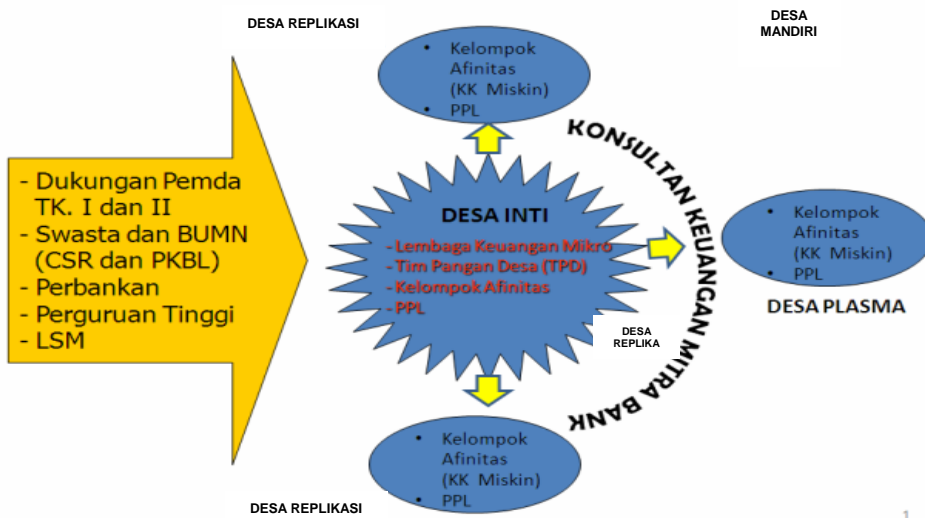
1. Penguatan Sumber Daya Sosial, untuk memupuk dan mengembangkan modal sosial masyarakat, serta membangun jaringan antar kelompok masyarakat;
2. Optimasi Pemanfaatan Sumber daya Alam, untuk memanfaatkan kekayaan dan kelimpahan sumber daya alam yang ada di sekitarnya;
3. Menabung Mandiri, untuk memobilisasi sumber daya finansial masyarakat di wilayah lokal, serta membangun jaringan antara kelompok-kelompok masyarakat miskin dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya;
4. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, untuk diversifikasi produk, penetrasi pasar domestik, dan peningkatan nilai tambah;
5. Penyebarluasan manfaat, untuk mendampingi kelompok-kelompok lain didalam dan luar desanya, serta untuk menjaga keberlanjutan usaha yang telah dikembangkan dalam fase-fase sebelumnya.

Kelima subgerakan tersebut dilaksanakan secara parsial sesuai dengan kebutuhan, namun untuk pengembangan sub-sub gerakan dilakukan dengan pendekatan kelompok. Karena penguatan kelompok-kelompok masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun modal sosial, maka Gema Pangan diawali oleh kelompok-kelompok yang telah mandiri di desa mapan untuk menebarkan manfaat yang telah diperoleh kepada desa-desa lain disekitarnya, baik manfaat ekonomi-finansial maupun manfaat sosial penguatan kelembagaan kelompok.

Sumber daya sosial merupakan *intangibile aset* yang mampu digerakan dalam mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan, sehingga dengan penguatan sumber daya sosial melalui Gema Pangan, maka solidaritas lokal akan semakin berkembang dan dapat memberikan sarana bagi kelompok-kelompok masyarakat yang lebih mampu untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, tanpa harus mengurangi kepemilikan finansialnya (melalui koperasi atau lembaga keuangan yang dikembangkan bersama-sama).

Pelaksanaan Gema Pangan melalui Kegiatan Desa Mapan dilakukan pada lokasi yang telah memasuki tahap kemandirian, memenuhi indikator kemandirian pangan, dan ditetapkan menjadi desa mandiri. Setiap Desa Mandiri ditetapkan menjadi Desa Inti, untuk melakukan pendampingan kepada 3 desa rawan pangan

di sekitarnya sebagai Desa Replikasi, dengan menggunakan metode Sekolah Lapangan Desa Mandiri Pangan (SL-DMP).



Sumber : Pedoman Teknis Demapan . (BKP, 2011)

Gambar 2. Gerakan Kemandirian Pangan melalui Perluasan Spasial Desa Mandiri

Melalui SL-DMP, desa-desa replikasi magang di desa inti yang menjadi laboratorium SL-DMP, dan desa inti berpartisipasi mendampingi desa-desa replikasi dalam usaha bisnis yang telah berkembang. Dengan demikian, maka: (1) desa mandiri akan berkembang secara berkelanjutan, serta kelompok afinitas akan mampu mengembangkan kemampuannya kepada kelompok masyarakat lain di dalam dan di luar desanya; dan (2) desa-desa replikasi akan dapat menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif kelompok dibidang *on-farm*, *off-farm*, dan *non-farm*.

Komponen Gema Pangan meliputi tiga kegiatan pokok yang mencakup aspek: pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan, dan dukungan pengembangan sarana prasarana perdesaan. Komponen kegiatan tersebut antara lain:

*Pertama*, fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat modal sosial melalui pendampingan. Tenaga penyuluh dapat ditugaskan untuk memperkuat TPD agar mampu membangun partisipasi dan memobilisasi seluruh aset yang ada di desa dalam penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan, baik melalui pengembangan jaringan antar kelompok masyarakat maupun melalui pengembangan usaha produktif kelompok-kelompok afinitas.

*Kedua,* pendampingan kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan potensi dan kelebihan sumber daya alam yang ada disekitarnya, untuk membangun usaha produktif. Fasilitasi kepada masyarakat dan pemerintah desa, diberikan untuk meningkatkan efisiensi usaha kelompok-kelompok afinitas, agar dapat bersaing dengan usaha-usaha lainnya.

*Ketiga,* pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kelebihan sumber daya modal yang telah dimiliki masyarakat dan desa. Untuk pengelolaannya, ditumbuhkan LKD yang juga berfungsi membangun partisipasi kelompok masyarakat secara struktural yang memiliki kelebihan keuangan, untuk lebih mengembangkan usaha produktif bagi RTM di sekitar.

Pelaksanaan Gema Pangan diimplementasikan melalui pengembangan desa-desa replikasi yang dibina selama tiga tahun dengan metode Sekolah Lapangan bagi desa-desa replikasi.

### **Kegiatan Desa Inti**

- a. Melanjutkan pelaksanaan Desa Mapan Reguler untuk meningkatkan peran TPD melalui : pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan, peningkatan kesinambungan dan keberlanjutan lingkungan, serta pemeliharaan sarana prasarana perdesaan.
- b. Mengembangkan kemitraan usaha dan memberdayakan masyarakat di desa replikasi.
- c. Melakukan integrasi kegiatan pemberdayaan lainnya melalui koordinasi lintas subsektor dan sektor.
- d. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam membina peningkatan kapasitas, kualitas usaha, peningkatan modal, layanan gizi bagi masyarakat, dan lainnya.

### **Kegiatan Desa Replikasi**

- a. Identifikasi potensi dan sumber daya (SDM, SDA), penyusunan data dasar RTM, dan profil desa.
- b. Penumbuhan kelembagaan masyarakat, meliputi: penumbuhan kelompok-kelompok afinitas termasuk kelompok-kelompok wanita, pembentukan TPD, penumbuhan LKD, dan penumbuhan lumbung pangan masyarakat.
- c. Pendampingan kelompok-kelompok afinitas dalam: pengembangan dinamika keorganisasian kelompok, penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK), serta penertiban administrasi dan keuangan.
- d. Pelatihan melalui sekolah lapangan atau demplot untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya (SDA dan SDM) sesuai potensi dan keterampilan masyarakat desa setempat.

- e. Penumbuhan dan pengembangan usaha-usaha produktif masyarakat.
- f. Pemanfaatan dana Bansos untuk menambah permodalan usaha.
- g. Perencanaan dasar pembangunan wilayah perdesaan secara partisipatif.
- h. Pengembangan LKD dan Gerakan Menabung Mandiri untuk meningkatkan permodalan LKD.

## **PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN**

Pemberdayaan adalah pilihan, kebebasan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, martabat, penghargaan, kerja sama dan rasa saling memiliki pada komunitas (Gonsalves *et al.*, 2005). Jo Ridwan dalam Buchori *et al.* (2003) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses dimana individu, organisasi atau kelompok yang dalam kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi sadar dan tahu (*having knowledge*) akan dinamika kekuasaan yang bekerja dalam konteks kehidupan mereka, membangun ketrampilan dan kapasitas untuk memperoleh kontrol pada kehidupan mereka, menjalankan (*exercise*) kontrol tanpa mengganggu hak-hak orang lain dan mendukung upaya pemberdayaan (individu atau kelompok) lain dalam masyarakat. Keempat proses tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator kasar untuk mengukur sampai sejauh mana suatu upaya pemberdayaan telah berhasil dilakukan.

Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh rangkaian pembangunan. Pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek untuk mengenali permasalahan, ikut dalam perencanaan program akan menghasilkan kemandirian yang tinggi (Mubyarto, 1984 ; Sajogyo, 1982).

Pemberdayaan dapat dipandang sebagai proses bertingkat yang melibatkan individu, komunitas dan organisasi. Keterlibatan individu berkaitan dengan keterlibatan dalam pengambil keputusan, sedangkan komunitas berhubungan dengan dampak keterlibatan. Menurut Syahyuti (2007) pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari sosial kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri. Dalam konteks pengembangan masyarakat pertanian dan perdesaan, Sumodiningrat (1997) mengartikulasikan pemberdayaan kedalam tiga aspek yaitu (1) menciptakan iklim atau kondisi yang memungkinkan potensi setempat berkembang, (2) memperkuat potensi atau energi dan modal sosial yang dimiliki masyarakat agar mereka mampu meningkatkan mutu kehidupan ke arah yang lebih baik, (3) melindungi atau mencegah kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang sudah lemah agar tidak menjadi semakin lemah.

Menurut Harianto (2007) untuk mewujudkan sektor pertanian dan perdesaan yang maju, modern, berdaya saing dan mampu memberikan

kesejahteraan bagi para pelakunya, diperlukan upaya-upaya yang terstruktur dan terukur. Berbagai upaya tersebut perlu dipetakan dalam dimensi waktu menurut prioritas dan kepentingan. Lebih lanjut Yadi (2007) menyatakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perdesaan diperlukan strategi : (1) perluasan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, (2) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha di perdesaan, (3) peningkatan akses masyarakat perdesaan terhadap sarana permodalan dan pemasaran, (4) kebijakan yang memihak masyarakat perdesaan dan (5) membantu masyarakat perdesaan meningkatkan modal manusia (pengetahuan, ketrampilan, kesehatan) yang mereka miliki.

Sementara itu yang dimaksud pemberdayaan dalam pedoman teknis kegiatan Desa Mandiri Pangan adalah : suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumber daya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri. Adapun proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan akses untuk pengembangan kerja sama partisipasi inklusif, kapasitas individu, kapasitas kelembagaan masyarakat, sosial dan ekonomi, serta ketahanan pangan. Sasaran pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di perdesaan. Beberapa kelembagaan yang harus diberdayakan untuk menjadikan desa mandiri pangan sebagai desa inti adalah : Kelompok Afinitas, Lembaga Keuangan Desa dan Tim Pangan Desa. Pemberdayaan ini menjadi penting karena kelembagaan tersebut akan menjadi tempat awal dalam melaksanakan Sekolah Lapangan Desa Mandiri Pangan (SL-DMP).

### **Pemberdayaan Kelompok Afinitas (KA)**

KA dibentuk dengan sekurang-kurangnya 30 persen Rumah Tangga Miskin (RTM) hasil DDRT dan terbagi dalam beberapa subkelompok sesuai dengan bidang/jenis usaha yang dilakukan anggota kelompok. KA dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan kebersamaan dan kemampuan kelompok sasaran dalam mengelola unit usahanya. Umumnya usaha yang dilakukan berdasarkan kebiasaan serta ketersediaan bahan baku yang ada disekitar lingkungan.

Agar kelembagaan ini bisa berjalan maka diharuskan dalam setiap KA ada kepengurusan, tata tertib, agenda pertemuan, serta tema untuk dibahas dalam pertemuan. Dalam pertemuan sangat banyak hal yang bisa didiskusikan antara lain: saling mengingatkan anggota untuk membayar pinjaman; membahas bagaimana memasarkan produk turunan seperti : keripik singkong, tepung tapioka, beraneka ragam jajanan pasar; membahas sebaiknya usaha apa (prospek) yang akan dijual dengan potensi yang ada; bahkan sampai pada diskusi hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti kesehatan anak, pendidikan anak, hajatan atau kedukaan. Tetapi dalam pelaksanaannya untuk melanggengkan keaktifan anggota KA tidaklah mudah. Banyak anggota kelompok yang tidak aktif lagi, hal ini

disebabkan bahasan dalam pertemuan relatif tidak ada kemajuan; tidak bisa menemukan jalan keluar dalam mengatasi permasalahan; tidak ada aturan yang tegas baik penghargaan untuk anggota yang aktif maupun sanksi untuk anggota yang tidak aktif. Untuk mengatasinya diperlukan usaha atau kegiatan agar kelembagaan KA tetap berjalan, diantaranya adalah : pelatihan administrasi dan usaha KA.

Pelatihan sangat dibutuhkan dalam KA dan pelatihan ini terdiri dari pelatihan administrasi dan pelatihan usaha. Pelatihan administrasi yang dilatih antara lain : (i) bagaimana membuat daftar hadir, untuk melihat anggota mana yang aktif, dan (ii) pelatihan dalam membuat buku keuangan, untuk mengetahui *cash flow* kelompok afinitas dan semua anggota bisa melihatnya. Pembukuan dapat dibagi atas : (i) pembukuan secara pribadi yang akan menjelaskan jumlah pinjaman, usaha dan riwayat pengembaliannya (Tabel 4) dan (ii) pembukuan secara berkelompok akan menggambarkan pinjaman anggota dan posisi keuangan kelompok (Tabel 5). Contoh tersebut dengan asumsi sudah disepakati bunga pinjaman, waktu pinjaman dan anggota boleh meminjam lagi apabila seluruh anggota sudah mengembalikan pinjaman. Dari Tabel 5 tersebut bisa diketahui jenis usaha para anggota, modal awal (Rp. 35.000.000), pendapatan (Rp. 8.400.000) dan modal yang tersedia (Rp. 43.400.000). Perkembangan arus kas (*cash flow*) kelompok ini akan disampaikan pada setiap pertemuan dan hal ini sesuai dengan semangat transparan dan akuntabilitas.

Tabel 4. Buku Peminjam Perorangan Peserta Program Demapan

No	Bulan	Pengembalian	Cicilan	Sisa Pinjaman	Pelunasan	Ket
1	Febuari 2011	2.480.000	206.667	2.273.333	V	-
2	Maret 2011	2.273.333	206.667	2.066.666	V	-
3	April 2011	2.066.666	206.667	1.859.999	V	Telat 3 hr
4	Mei 2011	1.859.999	206.667	1.653.332	V	-
5	Juni 2011	1.653.332	206.667	1.446.665	V	-
6	Juli 2011	1.446.665	206.667	1.239.998	V	-
7	Agustus 2011	1.239.998	206.667	1.033.331	V	Telat 7 hr
8	September 2011	1.033.331	206.667	826.664	V	-
9	Oktober 2011	826.664	206.667	619.997	V	-
10	November 2011	619.997	206.667	413.330	V	-
11	Desember 2011	413.330	206.667	206.663	V	-
12	Januari 2012	206.663	206.667	0	V	Telat 1 hr

Jumlah pinjaman Rp 2,0 juta dengan bunga 2 persen/bulan dan waktu pengembalian selama 1 tahun untuk kegiatan warung mereka.

Tabel 5. Buku Kas Kelompok Afinitas Mekar Sari Program Demapan

No	Jenis Usaha	Peminjam/orang	Pinjaman	Pengembalian	Pendapatan	Modal
1	Warung	2	4.000.000	4.960.000	960.000	4.960.000
2	Bakso	3	3.500.000	4.340.000	840.000	9.300.000
3	Saprodi	8	20.000.000	24.800.000	4.800.000	34.100.000
4	Kue	3	3.000.000	3.720.000	720.000	37.820.000
5	Dagang	3	4.500.000	5.580.000	1.080.000	43.400.000
Jumlah		19	35.000.000	43.400.000	8.400.000	43.400.000

Sumber : Data primer (diolah).

Pelatihan usaha sangat dibutuhkan dalam KA dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengadvokasi usaha-usaha apa yang sudah dilakukan. Dan usaha-usaha itu dikelompokkan kedalam usaha yang berhasil, kurang berhasil dan tidak berhasil. Langkah selanjutnya adalah membahas permasalahan untuk kelompok usaha yang kurang berhasil atau tidak berhasil. Apabila tidak ditemukan pemecahannya, maka disarankan usaha tersebut jangan diteruskan lagi. Sebaliknya apabila masalah tersebut ada dibagian ilmu pengetahuan, maka pelatihan sangat diperlukan, misalkan dalam hal pemasaran dengan membuat bungkus produk menjadi menarik, budidaya tanaman atau memelihara ternak yang efektif efisien, teknologi pengolahan produk turunan dan sebagainya. Langkah tersebut diperlukan agar pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang ada.

### **Pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa (LKD)**

Penumbuhan LKD dimaksudkan untuk mempersiapkan embrio lembaga yang mengelola keuangan di perdesaan. LKD ditumbuhkan oleh perwakilan kelompok-kelompok afinitas yang berfungsi untuk mengelola dana Bansos, simpanan modal/tabungan masyarakat, dan layanan permodalan kepada RTM khususnya dan masyarakat desa umumnya untuk pengembangan usaha produktif. Kepengurusan LKD dipilih oleh masyarakat desa, dan atau perwakilan dari KA dengan kriteria mampu mengelola keuangan dan usaha serta dipercaya oleh masyarakat. LKD di desa mandiri pangan merupakan hasil akhir dari kegiatan dan lembaga ini diharapkan bisa mengelola keuangan KA maupun gapoktan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya program Demapan yang masuk tahap kemandirian sudah mendirikan LKD dan masih mempercayakan pengelolaan keuangan di dalam kelompok (Darwis dan Rusastra, 2011).

Untuk mempercepat pembentukan lembaga LKD ada beberapa hal yang perlu disarankan antara lain dalam kepengurusan LKD sebaiknya mempekerjakan tenaga kerja yang sudah terbiasa mengerjakan masalah keuangan. Hal ini menjadi penting karena substansi pokok dari lembaga ini adalah manajemen keuangan dan tidak semua KA mempunyai SDM yang memadai. Tenaga kerja ini bisa diperoleh



dengan mengutamakan masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan akuntansi, pensiunan lembaga keuangan, para aktivis dan LSM. Atau tenaga/pengurus LKD yang ada akan diberikan pelatihan khusus mengenai administrasi keuangan dan pelatihan yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Selain itu masalah yang tak kalah pentingnya adalah penentuan pendapatan yang akan diperoleh oleh pekerja dalam mengelola keuangan tersebut.

Salah satu masalah belum maunya KA memberikan dana kelompok ke LKD, yaitu belum terbangunnya aturan main dalam pengelolaan keuangan oleh LKD. Aturan main yang paling utama adalah menyakinkan anggota KA bahwa LKD akan tetap dan mengutamakan memberikan pinjaman kepada anggota KA. Menyepakati bunga dan waktu pinjaman yang sebelumnya berada di masing-masing KA. Membuat aturan main pembagian dari bunga pinjaman dan yang paling penting lagi membuat aturan main peminjaman dan sanksi kepada anggota yang tidak membayar.

Aturan mainnya antara lain :

- Uang yang dikumpulkan dari seluruh KA akan dipergunakan untuk kepentingan seluruh anggota kelompok, apabila ada yang meminjam diluar kelompok LKD akan memberikan apabila ada persetujuan dari pengurus KA.
- Mekanisme peminjaman diawali dengan pengisian permohonan pinjaman yang berisikan besaran pinjaman, peruntukan pinjaman, waktu peminjaman. Kemudian formulir tersebut ditandatangani oleh pengurus KA. TPD akan mengevaluasi dan akan memberikan pinjaman modal berdasarkan keputusan usaha.
- Beberapa kesepakatan yang telah diambil, antara lain : besaran pinjaman tertinggi Rp. 3.000.000 terendah Rp. 500.000 ; lama pinjaman terlama 2 tahun dan terendah 6 bulan (satu musim) ; bunga pinjaman 2 persen perbulan ; sanksi akan diberikan kepada anggota yang tidak membayar yang diawali dengan teguran pertama, kedua dan ketiga. Apabila tetap tidak bayar maka TPD akan meminta ke KA dengan cara tanggung renteng atau mengambil barang sesuai dengan besaran pinjaman yang tidak dibayar.
- Pendapatan yang berdasarkan bunga tersebut akan dibagi berdasarkan :
  - 0,5 persen dikembalikan ke kelompok afinitas
  - 0,5 persen untuk manajemen LKD
  - 0,25 persen untuk pembelian kelengkapan administrasi (ATK) LKD
  - 0,75 persen untuk tambahan modal
- LKD membuat beberapa pembukuan keuangan antara lain : buku besar, buku keuangan masing-masing KA dan pembukuan ini boleh dilihat

oleh seluruh anggota kelompok afinitas. LKD akan mempertanggungjawabkan keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang akan disampaikan pada akhir tahun pada rapat seluruh anggota kelompok afinitas

- LKD harus didirikan secara legal atau berbadan hukum. Tujuannya untuk menambah modal LKD/KA dari investor atau dari lembaga keuangan lainnya. Apabila sudah berbadan hukum tentu akan mudah mendapatkan modal dan tidak sulit memasarkan produk dengan sistem kontrak.

### **Pemberdayaan Tim Pangan Desa (TPD)**

TPD beranggotakan 6 orang yang terdiri dari unsur pamong desa, BPD, KA, kader PKK, tokoh masyarakat dan penyuluh. TPD memiliki fungsi koordinasi dalam pembangunan wilayah desa, mengintegrasikan kegiatan pembangunan desa dengan program Demapan, serta mengawasi KA dan menggantikan fungsi tenaga pendamping. Tugas tenaga pendamping antara lain memberikan motivasi dan fasilitasi inovasi dalam menggerakkan usaha, dan ikut terlibat dalam memasarkan produk-produk olahan KA.

Peranan TPD sangat strategis karena sebagai motor penggerak program Desa Mandiri Pangan. Di dalam desa inti TPD harus mengawasi dan mendorong aktifitas baik di KA maupun di LKD. Sementara itu dalam desa replikasi TPD mempunyai tugas membentuk dan membina KA dan LKD. Dalam pelaksanaannya tidak semua desa memiliki TPD dengan kinerja seperti yang diharapkan (Darwis dan Rusastra, 2011). Ini disebabkan antara lain : begitu besarnya peranan dari pamong desa/kepala desa atau tokoh masyarakat ; tidak adanya aturan baku dalam pelaksanaan tugas ; tidak ada motivasi karena tidak ada jadwal pertemuan seandainya ada bahasan pertemuan relatif tidak berubah ; tidak ada dana khusus untuk menggerakkan organisasi ini, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya.

Untuk itu maka diperlukan penguatan kelembagaan ini dengan cara (i) pelatihan berorganisasi, studi banding baik ke LKD yang sudah maju atau perusahaan dan pabrik yang bisa menampung produk KA; (ii) Sosialisasi tentang peranan TPD harus dilakukan lagi; (iii) anggota TPD ditambah dengan aktifis atau LSM dari luar desa, tujuannya bisa memberikan warna dan semangat dalam menggerakkan organisasi. Apabila anggotanya semuanya adalah masyarakat didalam desa, maka ide-ide kreatif atau informasi dari luar desa tidak terakomodir; (iv) Diharapkan adanya dukungan dana dari APBD TK II untuk menggerakkan organisasi TPD; (v) TPD setiap tahun membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan Demapan.

Laporan ini selain diserahkan ke pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian, juga dilaporkan ke pemerintah kabupaten. Harapannya laporan pelaksanaan ini bisa dipergunakan sebagai bahan diskusi dalam muresbang

kabupaten dan provinsi. Dengan adanya laporan ini, maka masyarakat lain atau pihak Pemerintah Daerah (Pemda) mengetahui usaha apa yang dilaksanakan oleh anggota KA dan disisi lain juga akan diketahui apa permasalahan yang dirasakan. Harapan akhirnya permasalahan tersebut bisa diatasi oleh pemerintah daerah dan ini juga sesuai dengan semangat dari kegiatan Demapan, dimana terjadinya pembangunan lintas sektoral dan dukungan dana dari pemerintah daerah.

## PENUTUP

Tujuan akhir dari program Demapan adalah pengentasan kemiskinan yang basisnya adalah desa. Untuk mewujudkannya maka dibutuhkan sinergi program Demapan dengan program pengentasan kemiskinan yang ada di Kementerian Pertanian dan di luar Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaannya peranan dan koordinasi dari Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa menjadi strategis dan perlu ditingkatkan lagi.

Program Demapan merupakan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan untuk mensukseskannya tidak hanya menjadi tanggungjawab Badan Ketahanan Pangan Pusat saja. Untuk itu disarankan pelaksanaan Demapan peranan Badan Ketahanan Pangan Provinsi perlu ditingkatkan lagi dengan cara : (i) pengiriman dana dari pusat melalui provinsi dan nantinya provinsi yang mengirim ke kabupaten; (ii) provinsi ikut menentukan desa mana yang mendapatkan program berdasarkan anggaran dan skala prioritas kabupaten; (iii) provinsi membentuk tim pelaksana kegiatan permanen untuk mengantisipasi sering terjadinya pergantian SDM dan keberadaan institusi ketahanan pangan di tingkat kabupaten; (iv) provinsi bisa menjadi narasumber atau langsung membantu kabupaten dalam melakukan evaluasi; (v) provinsi melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan di kabupaten sebelum di laporkan ke pusat; (vi) provinsi bisa memberikan sanksi kepada kabupaten yang tidak melakukan evaluasi atau tidak membuat laporan kegiatan.

Hasil monev di setiap tahapan harusnya merekomendasikan desa mana yang layak untuk naik tahapan dan desa mana yang tidak layak naik tahapan. Monev kemandirian juga harus merekomendasikan desa mana yang tidak layak, perlu pembinaan dan layak menjadi desa inti dengan indikator keaktifan lembaga KA, LKD dan TPD. Bagi desa yang perlu pembinaan sebelum menjadi desa inti, yang paling utama dibina adalah TPD, karena TPDlah yang akan menjadi mediasi antara desa inti dan desa replikasi. Selanjutnya adalah KA, karena KA akan menjadi contoh dan motivasi desa replikasi dan selanjutnya adalah LKD yang tugas pokoknya memajemen keuangan anggota KA. Pemberdayaan yang bisa dilakukan antara lain : pelatihan keterampilan atau studi banding yang tujuannya menambah ilmu pengetahuan. Membantu memecahkan permasalahan spesifik usaha berdasarkan hasil advokasi ragam usaha di dalam kelompok.

Mempekerjakan tenaga yang mengerti tentang manajemen keuangan dan organisasi. Tenaga kerja ini bisa dari tenaga yang pernah bekerja di lembaga keuangan, para aktifis maupun tenaga LSM. Tenaga ini juga dipergunakan sebagai salah satu anggota TPD, tujuannya agar memudahkan koordinasi antara TPD, LKD, dan KA.

Dana dan pelaksanaan pembinaan diinisiasi oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dimasukkan dalam dana kegiatan Gerakan Kemandirian Pangan. Tahun berikutnya dana tersebut diharapkan dari dana APBD Tk I dan APBD Tk II. Selain dana pembinaan, dana untuk pengurus dalam menggerakkan organisasi TPD dan LKD perlu dibuat aturan mainnya. Hal ini menjadi penting, karena selama ini dana operasional lembaga tersebut diperoleh dari hasil SHU pinjaman KA yang dibagi setiap tahun. Dengan dana yang kecil tentu tidak akan bisa menggerakkan operasional kelembagaan dan oleh sebab itu Badan Ketahanan Pusat harus menyediakan dana awal operasional kelembagaan dan selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- BKP, 2011. Pedoman Teknis Kegiatan Desa Mandiri Pangan. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.
- BKP, 2011. Perkembangan Pelaksanaan Desa Mandiri Pangan Nasional Tahun 2011. Bahan Workshop Akhir Demapan Tahun 2011. Palembang 24-26 November 2011
- BKP. 2009. Workshop Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Bidang Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta
- Buchori, A, Sanusi dan S.R. Amelia (editor). 2003. Hanya Sebuah Langkah, Bukan Akhir Perjalanan. PWD-IPB. Bogor
- Darwis, V. dan I W. Rusastra. 2011. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP Dengan Desa Mandiri Pangan. Analisis Kebijakan Pertanian, 9(2): 125-142.
- Gonsalves, J., T. Becker, A. Braun, D. Campilon, H. de Chaves, E. Fajber, M. Capiriri, J.R. Caminade and R. Vernoy (editor). 2005. Participatory Research and Development for Sustainable Agricultural and Natural Resource Management : A Resource Book (Glossary). International Potato Center Users Perspective with Agricultural Research and Development. Philippines
- Hariyanto. 2007. Peranan Pertanian dalam Ekonomi Perdesaan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan : Mencari Alternatif Arah Pembangunan Ekonomi Rakyat. 4 Desember 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.

- Mubyarto. 1984. Strategi Pembangunan Perdesaan, P3PK UGM Yogyakarta.
- Syahyuti. 2007. Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian : Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI dan Primatani. Forum Penelitian Agro Ekonomi 25(2):104-116. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Sumodiningrat, G. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. PT Bina Rena Pariwara. Jakarta
- Sajogyo. 1982. Bunga Rampai Perekonomian Desa, Yayasan Obor Indonesia.
- Rusastra, I W., Supriyati dan V. Darwis. 2011. Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut Program Demapan. Bahan Workshop Akhir Demapan Tahun 2011. Palembang 24-26 November 2011
- Rusastra, I W., Supriyati, W.K. Sejati dan Saptana 2008. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan : Analisis Program Ketahanan Pangan dan Desa Mandiri Pangan. Laporan Hasil Penelitian. Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. Jakarta
- Rachman,B., IW.Rusastra, MH.Sawit, E.Basuno, EM.Lakollo, B. Prasetyo, H. Tarigan, Sunarsih, V. Darwis dan A. Askin. 2010. Laporan Hasil Penelitian Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertanian di Tingkat Rumah Tangga dan Wilayah Perdesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Kementerian Pertanian
- Yadi, A. 2007. Pemikiran Tentang Pendekatan Pembangunan Perdesaan : Implikasi dari Berbagai Temuan Studi SMERU dalam Hendayana. R, D. Arsyad dan E. Jamal. 2007. Prosiding Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal dari Desa. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor.